**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 1969, Sidang Menteri Luar Negeri ASEAN menyetujui dibentuknya suatu komisi yang ditugaskan melakukan studi mengenai kerjasama ASEAN. Komisi itu terdiri dari para ahli ECAFE (sekaranga bernama ESCAP), FAO, UNCTAD, dan dari Departemen ekonomi serta masalah sosial PBB. Dalam laporannya yang dikenal sebagai “KANSU REPORT” atau “ROBINSON REPORT” komisi antara lain menyarankan diadakannya perdagangan bebas secara terbatas melalui perundingan tarif yang selektif atas suatu mata dagangan (*selective product-by-product tariff negoitations*), pengaturan secara paket (*package deal arrangements*), untuk proyek-proyek industri besar, dan kerjasama keuangan[[1]](#footnote-2).

Visi dari Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah realisasi tujuan dari integrasi ekonomi dimana yang dianut dalam *ASEAN Vision 2020* yaitu untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal yang lebih bebas[[2]](#footnote-3). Percepatan pembentukan komunitas ASEAN dari 2020 menjadi 2015, disepakati oleh para Kepala Negara ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN. Komunitas ASEAN 2015 terbagi dalam tiga pilar, yaitu: Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN[[3]](#footnote-4).

ASEAN telah menyepakati akan diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada Cetak Biru ASEAN atau *AEC Blurpint* yang memuat empat pilar utama, yaitu: (1) ASEAN sebagai Pasar tunggal dan basis produksi yang didukung dengan elemen aliran bebas barang,jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai Kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce;* (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global[[4]](#footnote-5).

Di era globalisasi ekonomi setiap negara menghadapi persaingan yang semakin ketat di dua medan perang, yakni perdagangan bebas serta *(foreign direct investment/* FDI) (yang selanjutnya disebut Investasi). Hal ini kemudian ditandai dengan diimplementasikanya perjanjian perdagangan bebas *(free trade area)*  dan perjanjian investasi *(investment agreement)* serta kemajuan tekhnologi informasi, yang menjadikan semakin terkikisnya hambatan-hambatan perdagangan, lalu lintas keuangan internasional yang semakin bebas, dan keluar masuknya arus modal dan investasi di tiap-tiap negara. Dampak dari bergulirnya era globalisasi ini akan menimbulkan persaingan ketat di antara negara-negara, sehingga hanya negara yang memiliki kemampuan bersaing saja yang akan mampu bertahan[[5]](#footnote-6). Hal tersebut menuntut untuk melaksanakan pembangunan ekonomi mengingat Kerjasama negara-negara ASEAN di sektor industri terutama dikembangkan atas dasar tiga bentuk yaiu: proyek industri ASEAN (AIP), Kompelementasi Industri ASEAN (AIC), dan Proyek Industri Patungan ASEAN (AIJV). Disamping itu usaha juga diarahkan untuk meningkatkan arus teknologi, ketrampilan dan investasi ke negara-negara ASEAN dan pertukaran informasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan dan perencanaan-perencanaan industri nasional diantara negara-negara ASEAN[[6]](#footnote-7).

Batasan-batasan negara tidak lagi menjadi hambatan untuk berinteraksi tanpa memikirkan ruang dan waktu, begitupun aktivitas ekonomi menjadi lebih efektif dan efesien. Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi diarahkan pada berbagai sektor untuk meningkatkan proses produksi yang dituntut lebih cepat dalam upaya memenangkan persaingan menguasai pasar. ketika dukungan bagi demokratisasi dideklarasikan oleh setiap negara di dunia, liberalisasi ekonomi merupakan aspek yang paling dominan dalam isu-isu kerjasama antar negara. kebebasan yang diberikan dari nilai demokrasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tarap hidup masyarakat untuk leluasa berkreasi dibidang ekonomi. Hal tersebut dilakukan atas dasar keyakinan bahwa politik dan ekonomi ibarat dua sisi mata uang atau saling bergantung antara satu sama lain. Ketersediaan ruang gerak bagi kebebasan ekonomi merupakan suatu kemajuan bagi suatu bangsa untuk menumbuhkan perekonomian nasional dan jawaban dari persaingan ekonomi global. Hal tersebut memberikan kesempatan untuk mendapat keuntungan bagi suatu negara yang mampu mempersiapkan, memanfaatkan, dan mengembangkan potensi ekonomi nasionalnya dalam persaingan global..

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman budaya, dan populasi terbesar di kawasan Asia Tenggara, hal tersebut merupakan modal ekonomi bangsa yang sudah seharusnya dapat mensejahterakan rakyatnya. Salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh Indonesia yaitu investasi. Dimana Indonesia membutuhkan bantuan modal untuk menumbuhkan ekonomi nasionalnya. Meskipun aturan investasi telah dibahas didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)[[7]](#footnote-8), tetapi upaya pemerintah dalam meningkatkan arus penanaman modal di Indonesia telah mengalami beberapa perbedaan antara DNI 2014 dengan DNI 2010, antara lain terkait dengan kebijakan tentang kepemilikan modal asing yang bertambah, berkurang, serta terdapatnya penambahan bidang usaha baru yang belum diatur dalam DNI 2010[[8]](#footnote-9). DNI 2014 mengatur kebijakan tentang bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal serta bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang terbagi dalam tiga kelompok, yaitu: (1) bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; (2) bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, lokasi tertentu, (3) serta perizinan khusus[[9]](#footnote-10). Seperti yang ditegaskan oleh Hatta Rajasa pemerintah memiliki empat alasan untuk melakukan revisi DNI. Empat alasan tersebut adalah guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan antisipasi dampak krisis global melalui investasi, menyederhakan investasi, menyesuaikan dengan UU yang ada serta harmonisasi dan penyederhanaan bidang usaha[[10]](#footnote-11).

Ekonomi berdiri diatas kaki sendiri (berdikari) harus diterjemahkan kembali mengingat meningkatnya kebutuhan permintaan pasar yang lebih luas, perkembangan iptek, dan tuntutan persaingan ekonomi global. Hal tersebut membutuhkan negara negara yang memiliki kepastian hukum, kesetabilan politik, sumber daya manusia yang memadai, dan ekonomi yang kondusif.

pada pemerintahan orde baru Indonesia tercatat, pada dasawarsa pertama pemerintahan Soeharto (1971-1981), ekonomi nasional selalu berada diatas 5 persen pertahun. Kondisi ekonomi yang sehat itu ditopang oleh beberapa faktor seperti penjualan minyak dan sektor *non* migas lainnya yang digalakkan sejak awal 1980-an. Bukan cuma pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang menunjukkan perkembangan, pada tahun 1993, jumah penduduk yang mencapai 27 juta jiwa sekitar 15 persen warga miskin diklaim berkurang. Penurunan itu mengacu pada tahun 1970 warga miskin yang mencapai 60 persen dari jumlah penduduk indonesia. Memasuki tahun 1990-an, pertumbuhn ekonomi Indonesia diklaim mencapai 7 persen. Ketika itu pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk dalam pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. *World Bank* menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara performa ekonomi tertinggi di Asia. Namun setelah ancaman krisis moneter pada pertengahan 1998 perekonomian Indonesia terus merosot[[11]](#footnote-12). Menyadari atau belajar dari pemerintahan orde baru, Indonesia sendiri terjebak atau hanya memperhatikan pada manajemen industrialisasi ekonomi domestik yang berorientasi pada *output* barang mentah atau komoditi bukan pada produksi.

Bagi Indonesia, stabilitas politik masih bersifat sensitif sehingga tidak jarang tuntutan perubahan diwarnai dengan berakhir anarki. Hal tersebut tentunya menyebabkan infrastruktur yang masih lemah semakin terganggu apalagi jika kondisi ekonomi yang sedang lesu. Agenda penting pemerintah yang sudah seharusnya menjadi perhatian yaitu mengembangkan iptek, pengembangan infrastruktur dan manajemen ekonomi yang lebih kondusif sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan pada sektor ekonomi melalui kekuatan investasi. Hambatan lainnya baik dalam pelayanan birokrasi atau pengelolaan yang tumpang tindih harus menjadi program prioritas “revolusi mental” pemerintah selain transparansi dan kepastian hukum. Lemahnya pembangunan ekonomi tersebut membuat indonesia kurang berkreasi memainkan roda perekenomian global sehingga arus lalu lintas investasi menjadi terhambat dan beralih ke negara lain. Padahal masalah tersebut merupakan nilai jual *(selling point)* bagi Indonesia sendiri untuk menarik investasi dan mengeksplorasi sumber daya sebagai respon keadaan ekonomi domestik yang menuntut adanya perubahan ekonomi yang lebih cepat dalam menanggulangi kemiskinan dan penganggurangan.

Laporan *United Nation Confrence Trade And Development* (UNCTAD) dalam laporan tahunan 2014 menyatakan bahwa Indonesia mengalami kenaikan penanaman modal asing sebesar 20 persen ke angka US$22,6 miliar dari US$ 18,8 miliar dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan investasi asing di Indonesia ini merupakan yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara, ini merupakan yang tertinggi diantara negara lainnya. Pertumbuhan PMA di Singapura sendiri mencapai 4,2 persen meskipun jumlah PMA-nya sebesar US$ 67,5 miliar. Atau tiga kali lipat lebih besar dari Indonesia[[12]](#footnote-13). Laporan tersebut mendeskripsikan peluang Indonesia yang akan bersaing dan memanfaatkan liberalisasi perdagangan AEC sekaligus meningkatkan upaya pemerintah untuk menghapus dan memperbaiki hambatan-hambatan bagi masuknya investasi di Indonesia.

 Tantangan pertumbuhan ekonomi nasional yang dibutuhkan melalui AEC adalah sebarapa siap dan terbukanya suatu negara dalam menerima liberalisasi perdagangan tanpa adanya hambatan yang akan menganggu laju perekonomian. kesempatan tersebut menjadi pekerjaan rumah tangga bagi Indonesia untuk mempersiapkan perubahan atau perbaikan suatu tatanan yang menghambat perekonomian domestik dalam menarik investasi yang dapat dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

*Nationa single window for investment* (NSWI) atau Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) telah menjadi agenda pemerintah bagi pendaftaran dan pendirian bidang usaha. Akan tetapi, besarnya variasi perijinan antar daerah, keterlibatan berbagai instansi teknis, dan ketiadaan informasi yang terintegrasi, serta validasi masih tetap menjadi kendala. Dengan adanya program semacam itu diharapkan untuk kemudahan mendapatkan informasi dan percepatan proses perizinan penanaman modal[[13]](#footnote-14).

Tidak dapat dipungkuri bahwa pertumbuhan ekonomi senantiasa menciptakan ketimpangan masyarakat, hal demikian sering menjadi gejala yang menghambat bahkan menjadikan perekonomian menjadi sulit berkembang dan berujung pada deindustrialisasi. Padahal gejala ketimpangan tersebut merupakan hasil dari ketakutannya sendiri karena menolak perubahan yang tidak bisa dihindarkan. Dengan adanya investasi yang menggerakkan roda ekonomi, setiap negara memiliki kesempatan untuk memperbaiki perekenomian nasionalnya. Sebagai jawaban dari laporan *mckensey* yang meramalkan Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 di dunia, Wakil Menteri PPN/ Wakil Kepala Bappenas, Dr. Lukita Dinarsyah Tuwo menyatakan bahwa; untuk menjadi negara dengan perekenomian negara terbesar ke-7 di dunia, pemerintah Indonesia perlu melakukan berbagai terobosan penting guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia[[14]](#footnote-15). Letak geografis yang strategis menjadikan Indonesia sebagai negara yang patut diperhitungkan oleh dunia dan kepentingan-kepentingan nasional negara lain untuk melibatkan atau menjalin kerjasama dengan Indonesia. Dengan peluang tersebut, Indonesia yang sebelumnya masih memfokuskan perhatian pada *output* komoditi sudah seharusnya industri Indonesia bergerak pada *output* produksi atau barang jadi dengan kualitas standar internasional yang siap untuk bersaing dengan produk negara lain melalui *ASEAN Economic Community* sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan masyarakat ASEAN secara keseluruhan.

Dengan terbentuknya AEC, maka ASEAN akan memasuki tahap akhir dari integrasi ekonomi. Pada tahun 1961, teori integrasi ekonomi yang pertama kali dipublikasikan oleh Bela Balassa yang menyatakan bahwa terdapat lima tahapan integrasi yaitu *preferential trading arrangements, free trade area, customs union, common market, dan economic union* (Pomfret 2006, hal.72). Pada saat ini, ASEAN telah menerapkan ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) sejak tahun 1991 yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan berupa tarif antar sesama anggota ASEAN, dan menerapkan *ASEAN Single Window* (ASW) pada tahun 2013 yang bertujuan untuk mengintegrasikan sistem Bea dan Cukai di seluruh kawasan ASEAN (Alomonte 2013). Dengan penerapan AEC pada tahun 2015 maka pada dasarnya ASEAN akan menerapkan *common market dan economic union* pada saat yang bersamaan[[15]](#footnote-16).

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang terlibat dalam *ASEAN Economic Community*, peneliti mencoba meneliti bagaimana *ASEAN Economic Community* ini berjalan dan mempengaruhi kondisi iklim investasi di Indonesia. Berdasarkan indikator pada penelitian tersebut, maka peneliti mencoba untuk mengadalan penelitian dengan mengambil judul:

**“PENGARUH ASEAN ECONOMIC COMMUNITY TERHADAP KONDISI IKLIM INVESTASI DI INDONESIA**”

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai kerangka pokok dalam mengadakan pembahasan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya ASEAN untuk menjamin kebebasan investasi di kawasan Asia Tenggara melalui *ASEAN Economic Community* sebelum dan sesudah tahun 2012?
2. Bagaimana kondisi iklim investasi di Kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia sebelum dan sesudah tahun 2012?
3. Bagaimana *ASEAN Economic Community* dalam mempengaruhi kondisi iklim investasi di Indonesia sebelum dan sesudah tahun 2012?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengingat banyaknya sumber penelitian dan keterbatasan penulis, maka penelitian ini difokuskan pada kajian pengaruh *ASEAN Economic Community* terhadap kondisi iklim investasi di Indonesia.

1. **Perumusan Masalah**

Untuk menghindari bahasan yang menyimpang jauh, maka penulis membatasi kajian yang menjadi permasalahan dalam penuluisan ini adalah: bagaimana pengaruh *ASEAN Economic Community* terhadap kondisi iklim Investasi di Indonesia?

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. Tujuan

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian dalam studi hubungan internasional ini adalah untuk mengetahui:

* 1. Upaya ASEAN untuk menjamin kebebasan investasi di kawasan Asia Tenggara melalui *ASEAN Economic Community*.
	2. Kondisi iklim investasi di kawasan Asia Tenggara, Khususnya di Indonesia.
	3. *ASEAN Economic Community* dalam mempengaruhi kondisi iklim investasi di Indonesia.
1. Adapun kegunaan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:
	1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan tentang kerjasama internasional antara *ASEAN Economic Cmmunity* dan pengaruhnya terhadap kondisi iklim investasi di Indonesia.
	2. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:
		1. Untuk memberikan penjelasan pada pihak lain yang tertarik dan berminat untuk meneliti masalah diatas, menjadikan tulisan yang bersifat komperatif bagi tulisan yang serupa dan menjadi referensi tambahan bagi pengembangan serta memberikan ilustrasi pada yang berminat untuk mengetahui, mempelajari dan meneliti lebih lanjut mengenai kondisi iklim di Indonesia melalui *ASEAN Economic Community.*
		2. Sebagai dedikasi penulis dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi masayarakat dunia juga bagi bangsa dan negara, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan tujuan bagi mereka yang membutuhkan, khususnya untuk pengembangan studi hubungan internasional itu sendiri dan
		3. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian strata 1 atau (S1) pada jurusan hubungan internasional fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Pasundan Bandung.
2. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
3. **Kerangka Teoritis**

Pada kerangka teoritis ini, penulis memafarkan beberapa pengertian dari konsep yang penulis kaji untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam judul dengan berdasarkan pada teori-teori hubungan internasional dari berbagai pakar yang berhubungan dengan bahan kajian penelitian dan sumber-sumber yang sesuai dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Dalam hubungan internasional yang kontemporer, setiap negara cenderung tidak dapat memenuhi kebutuhannnya sendiri. Hal tersebut mengharuskan suatu negara untuk bekerjasama baik, dengan suatu negara, individu, maupun kelompok. Para ilmuan seperti **Zimmern, Noel-Bajer**, dan **Wilson**, mereka percaya bahwa **“perdamaian hanya dapat dipertahankan dengan sistem keamanan bersama yang meliputi tindakan mentransfer konsep dan praktik masyarakat domestik ke lingkup internasional**”[[16]](#footnote-17).

Dalam pelaksanaan suatu kerjasama yang melintasi batas nasional ini, tentunya setiap aktor memerlukan pemahaman mengenai perilaku atau bentuk hubungan internasional yang selanjutnya menciptakan suatu kebijakan politik luar negeri yang sesuai dengan kepentingan nasional setiap negara dengan memperhatikan perilaku hubungan internasional yang saaat ini berlangsung.

**J.C. Johari** mengemukakan definisi tentang fenomena hubungan internasional, yaitu **“sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juda studi tentang pelaku-pelaku *non* negara (*non state actors)* yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara”**[[17]](#footnote-18).

Interaksi dalam hubungan internasional dilakukan oleh aktor negara maupun *non* negara yang menciptakan perilaku atau aktivitas-aktivitas yang pada akibatnya akan mempengaruhi setiap negara yang melaksanakannya. Hal demikian akan mempengaruhi cara pandang setiap negara dalam pergaulan internasional untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain.

Kemudian **Suwardi Wiryaatmaja, M.A.**, mengemukakan bahwa:

**Hubungan Internasional membahasa keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasinonal dalam arti sempit, menitik beratkan pada diplomasi dan hubungan antarbangsa serta satuan politik lainnya. Hubungan internasional mencakup segala macam hubungan antar bangsa kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia[[18]](#footnote-19).**

Hubungan internasional menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan, yaitu kerjasama *(cooperation),* persaingan *(competition)* dan konflik *(conflict)* antarnegara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional diantara negara-negara atau bangsa di dunia. Hubunga internasional merupakan landasan bagi begara-negara atau bangsa seluruh dunia dalam meningkatkan kohesifitas dengan negara lainnya[[19]](#footnote-20).

Keikutsertaan Indonesia pada keanggotaan ASEAN merupakan bentuk ketertiban sebuah negara dalam suatu organisasi internasional yang merupakan salah satu bentuk upaya menjalankan politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan serangkaian atau seperangkat kebijaksanaan suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain atau dalam pergaulannya dengan masyarakat dunia yang kesemuanya didasarkan dalam rangka mencapai kepentingan nasional.

Istilah politik luar negeri menurut **P. Anthonius Sitepu** dalam buku *Studi Hubungan Internasional,* yaitu:

**Politik luar negeri adalah keseluruhan perjalanan keputusan pemerintah untuk mengatur semua hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kebijaksanaan atau tindakan yang diambil dalam hubungannya dengan situasi atau aktor yang ada di luar batas-batas wilayah negara. Politik luar negeri merupakan manifestasi utama dari perilaku negara dalam hubungannya dengan negara lain, sehingga yang terjadi adalah adanya interaksi antar negara[[20]](#footnote-21).**

Didalam Hubungan Internasional, politik luar negeri memiliki tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang dirumuskan oleh setiap negara karena didalamnya terdapat berbagai kepentingan-kepentingan nasional yang menyangkut kelangsungan hidup suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu perangkat yang dapat mempengaruhi untuk mencapai tujuan tersebut yaitu melalui diplomasi.

Keterampilan suatu negara dalam berdiplomasi merupakan salah satu syarat penting dalam hubungan internasional. Penjelasan mengenai diplomasi, **Sir Ernest Satow** sejak tahun 1992 telah mendefinisikan diplomasi, yaitu **“sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat, yang kadang kala diperluas dengan hubungan dengan negara jajahannya”**[[21]](#footnote-22).

Diplomasi memiliki peranan penting sebagai instrument dalam bergaul dengan negara-negara lain. Diplomasi digunakan oleh negara-negara untuk menjaga dan menjalin hubungan antara satu sama lain yang menjadi aktor dalam hubungan internasional.

Sejalan dengan **Satow, Barston** juga mendefinisikan diplomasi yaitu:

**Sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, *looby,* kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait[[22]](#footnote-23).**

Sebagai manajemen dalam berinteraksi dengan negara lain melalui perwakilan resmi, diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap pemerintahan negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsesi, atau mengirimkan ancaman[[23]](#footnote-24).

Melalui diplomasi sebagai seperangkat instrumen dalam hubungan internasional, kepentingan nasional suatu negara dijalankan dalam bentuk dan diaplikasikan melalui kerjasama. Suatu kerjasama internasional merupakan modal yang menjadikan hubungan menjadi baik antara negara-negara di dunia. **K.J Hoslti** menyatakan bahwa **“kerjasama dapat menciptakan kesan seperti organisasi internasional yang bekerja keras untuk menyelesaikan berbagai masalah bersama”.**

Kerjasama internasional diusahakan karena hasil pertimbangan akan manfaat yang diperoleh, tetapi tidak lepas dari konsekuensi yang harus ditanggung. Perbandingan yang nampak antara manfaat dan konsekuensi dari suatu kerjasama internasional, merupakan salah satu faktor utama yang menentukan sukses atau gagalnya kerjsama tersebut.

**James E. Dougherty** dalam bukunya yang berjudul *Contending Theories of International Relations,* menjelaskan bahwa:

**Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional, yaitu berdasarkan sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (1986:419[[24]](#footnote-25).**

Hal tersebut diakarenakan bahwa kekerasan dianggap sebagai bentuk hubungan sosial yang ketinggalan zaman, yang tidak berkaitan dengan perubahan sifat manusia atau struktur sistem internasional[[25]](#footnote-26). Adanya kerjasama internasional dapat diasumsikan sebagai penyesuaian dan saluran diantara kepentingan-kepentingan nasional yang terkolektif. Kerjasama internasional yang sifatnya mengikat setiap anggota negara didalamnya diarahkan pada diwujudkannya suatu organisasi yang disebut organisasi ineternasional.

Definisi organisasi internasional menurut **Boer Mauna** dalam bukunya *Hukum Organisasi Internasional* menegaskan bahwa **“organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri”[[26]](#footnote-27).**

 Organisasi internasional merupakan suatu wadah pertemuan secara berkala oleh negara-negara yang melintasi batas nasional-nasional mereka dalam menyatukan masing-masing kepentingan melalui bentuk kerjasama yang menjadi kesepatakan internasional.

 Dalam hal ini **Teuku May Rudy** berpendapat lebih lengkap dan menyeluruh jika organisasi internasional didefinisikan sebagai:

**Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok *non* pemerintah pada negara yang berbeda[[27]](#footnote-28).**

 Lebih lanjut beliau menyatakan unsur-unsur untuk suatu organisasi internasional yaitu “**Kerjasama yang ruang linkgupnya melintasi batas-batas negara, mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama, baik antar pemerintah maupun *non* pemerintah, struktur organisasi yang jelas dan lengkap, melaksanakan fungsi secara berkesinambungan”[[28]](#footnote-29).**

 Suatu organisasi internasional dibentuk oleh dua atau lebih pihak atau aktor baik antarnegara atau negara dengan *non* negara yang didalamnya terdapat serangkaian tujuan yang hendak dicapai atas dasar kepentingan bersama.

 Kemudian, **Boweet** mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan:

1. **Fungsi : organisasi politik, organisasi administrasi, organisasi-organisasi yang mempunyai kompetensi luas dan organisasi-organisasi yang mempunyai kompentensi terbatas.**
2. **Sifat : global dan regional.**
3. **Perjanjian : antarnegara dan antarpemerintah dan *non* pemerintah.**
4. **Kewenangan : yang mempunyai kewenangan supranasional dan tidak mempunyai kewenangan suprasnasional[[29]](#footnote-30).**

Kehadiran organisasi internasional tidak hanya sebagai wadah bagi aktivitas tiap-tiap negara tetapi juga memiliki fungsi dan tujuan yang hendak digunakan untuk mencapai kepentingan dalam menangani berbagai persoalan secara bersama.

ASEAN merupakan organisasi internasional yang menghimpun negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ASEAN mengarah pada suatu bentuk integrasi kawasan yang dapat dijelaskan melalui konsep regionalisme.

Regionalisme selalu menjadi bagian dari hubungan internasional dimana terdapat pembagian-pembagian terhadap aktor-aktornya berdasarkan region. Dapat dikatakan regionalisme adalah sebuah proses menuju keteraturan global, sehingga membentuk sebuah dunia yang baru atau reformasi terhadap posisi aktor-aktor yang terdapat didalamnya. Hal ini terus berlangsung dan berlanjut sehingga menjadi ciri khas dalam dunia internasional, utamanya setelah berakhirnya perang dunia kedua dalam hal kemanan internasional dan perekonomian (Archarya dan Johnston, 2007). Seperti yang dikemukakan **Karl W. Deutsch**, bahwa **“hubungan internasional mempelajari tentang dinamika sosial dan integrasi regional dalam lingkup internasional”[[30]](#footnote-31).**

Perkembangan mengenai kajian dalam hubungan internasional yaitu terdapat suatu bentuk kerjasama antar negara-negara didalam suatu kawasan. Istilah regionalisme sendiri menurut **Mansbaach** dalam buku *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional,* yaitu **“*Region* atau kawasan adalah pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan, dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional”[[31]](#footnote-32).**

Regionalisme merupakan suatu kontruksi sosial didalam suatu kawasan dimana negara-negara yang berdekatan atau memiliki kesamaan secara geografis melakukan interaksi yang tidak terarah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan di negaranya. Dalam praktik-praktik di lapangan, definisi region atau kawasan dan regionalism sering tumpang tindih. Secara singkat dapat diandaikan kawasan itu layaknya wadah dan regionalisme adalah isinya; kawasan adalah jasad manusia, sementara regionalisme adalah ruhnya. Selain itu, penting untuk memisahkan pengertian regionalisme sebagai deskripsi dengan regionalisme sebagai preskripsi. Regionalisme sebagai deskripsi berarti regionalisme sebagai deskripsi berarti regionalisme sebagai posisi moral, sementara regionalisme sebagai preskripsi berarti regionalisme sebagai suatu doktrin atau ajaran tentang bagaimana hubungan internasional itu seharusnya diatur[[32]](#footnote-33).

Konsep terhadap suatu regionalisme bukan sesuatu yang terjadi secara langsung, tetapi memiliki proses atau tahapan-tahapan sebagaimana menurut **Anderw Hurrel** terdapat lima proses yang menjadi ciri-ciri berlangsungnya regionalisme, yaitu:

1. **Regionalisasi**

**Terdapat dua pengistilahan regionalisme dalam proses ini, yaitu:**

1. ***Soft regionalism***
2. ***Transnational regionalism***
3. **Kesadaran dan identitas regional *(regional awareness and identity)***

**Proses kesadaran regional menentukan pada, diantaranya:**

* 1. **Bahasa dan retorika;**
	2. **Pada wacana tentang regionalisme dan berbagai proses politik dimana berbagai definisi tentang regionalisme dan identitias regional terus didefinisikan; dan**
	3. **Pada pemahaman umum dan pengertian yang diberikan pada kegiatan politik yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat.**
1. **Kerjasama regional antarnegara *(regional interstate cooperation)***
2. **Integrasi regional yang didukung negara *(state promoted regional integration)***
3. **Kohesi regional *(regional cohesion)***

**Kohesi dapat dipahami dalam dua hal, yaitu:**

* 1. **Ketika kawasan memainkan suatu peranan tertentu dalam hubungan diantara negara-negara (aktor utama lainnya) dari kawasan tersebut dengan negara-negara lainnya di dunia; dan**
	2. **Ketika kawasan membentuk dasar pengaturan bagi kebijakan di dalam kawasan meliputi isu-isu yang cukup luas[[33]](#footnote-34).**

Pada dasarnya regionalisme dibentuk dan diarahkan oleh pemerintah disertai dukungan oleh warga negara di dalam suatu kawasan sehingga timbul karakteristik dari suatu regionalimse. Karakteristikdari regionalisme itu sendiri menurut **Joseph S. Jr. Nye**, seorang teoritisi hubungan internasional dari AS yang cukup terkemuka mengemukakan bahwa konsep ini bersifar *ambigious.* Lima karakteristik didalam mengklasifikasikan suatu kawasan, yaitu:

1. **Negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan memiliki kedekatan geografis.**
2. **Mereka memiliki pula kemiripan sosiokultural.**
3. **Terdapatnya kemiripan sikap dan tindakan politik seperti yang tercermin dalam organisasi internasional.**
4. **Kesamaan keanggotaan dalam organisasi internasional.**
5. **Adanya ketergantungan ekonomi yang diukur dari perdagangan luar negeri sebagai bagian dari proporsi pendapatan nasional[[34]](#footnote-35).**

ASEAN merupakan karakteristik organisasi internasional yang dibangun atas dasar kedekatan geografis, sejarah, sosial, dan ekonomi. Hal ini menciptakan kondisi-kondisi untuk mendorong integrasi yang dinyatakan oleh **Walter S. Jones**, antara lain:

1. **Asimilasi sosial berupa toleransi perbedaan budaya, identitas bersama atas tujuan-tujuan kebijakan luar negeri, dan kedekatan hubungan antarpemerintah dan antarbangsa secara umum.**
2. **Kesamaan nilai, terutama diantara kamu elit yang akan mempengaruhi masalah perencanaan, pelaksanaan, pembutan keputusan, dan sebagainya.**
3. **Keuntungan yang akan diperoleh oleh anggotanya.**
4. **Kedekatan hubungan dimasa lampau.**
5. **Pandangan akan pentingnya integrasi itu sendiri.**
6. **Ekspektasi pertimbangan biaya.**
7. **Pengaruh-pengaruh eksternal yang menjadi katalisator tumbuhnya integrasi[[35]](#footnote-36).**

Bentuk integrasi yang dibentuk atau diciptakan oleh ASEAN yaitu integrasi ekonomi melalui *ASEAN Economic Community.* Terdapat tiga dimensi penting yang terkait dengan pembentukan integrasi ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. **Melalui migrasi manusia.**
2. **Perdagangan barang dan jasa.**
3. **Pergerakan modal dan pasar keuangan**[[36]](#footnote-37).

Alasan keberadaan suatu kerjasama regional dibentuk berdasarkan beberapa faktor[[37]](#footnote-38).

Gambar 1: Faktor Pembentukan Kerjasama Ekonomi Regional

Sumer gambar: Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif hukum dan Globalisasi* (jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 151.

Selain itu perlu dijelaskan bahwa tahapan yang lazim dalam model pembentukan *multinational cooperation* adalah melalui beberapa fase yang pentahapannya diantaranya:

1. ***Regional Cooperation Group***
2. ***Free Trade Area***
3. ***Customs Union***
4. ***Common Market***
5. ***Political Union[[38]](#footnote-39).***

 Dalam tahapan atau proses regionalisme tersebut tentunya merupakan hasil dari interaksi yang meliputi semua aspek kehidupan, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial, juga budaya. Regionalisme di suatu kawasan dapat diasumsikan dengan ukuran tingginya tingkat interdependensi masyarakat antar negara didalamnya yang mengarah pada dimensi ekonomi sebagai upaya memenuhi kebutuhannya, selain itu perkembangan ilmu dan teknologi dibidang infromasi, komunikasi, dan transportasi telah menciptakan kohesi sosial yang intens, sistem ekonomi yang tunggal, pola investasi yang terintegrasi dan aspek budaya yang mendunia mengarah pada konvergensi[[39]](#footnote-40).

 Munculnya integrasi ekonomi kawasan sebagaimana dikemukakan oleh **Mitrany**, bahwa:

**Awalnya kerjasama antara negara-negara biasanya dilakukan dalam area-area teknis ketika mereka merasa cocok satu sama lain, tetapi sekali berhasil kerjasama itu dapat ‘menjalar’ kedalam area-area fungsional yang lain ketika negara-negara tersebut menemukan bahwa keuntungan bersama dapat diperoleh[[40]](#footnote-41).**

Ketergantungan akan menggantikan persaingan nasional, tindakan penyerangan sepihak, dan saling balas dendam yang merajalela dimana-mana. pasar bebas dan penghapusan berbagai rintangan perdagangan merupakan jantung ketergantungan modern[[41]](#footnote-42).

Penjelasan mengenai pasar bebas **Robert Gilpin** (1987)menyatakan bahwa “**Ekonomi pasar pada hakikatnya merupakan sistem dimana unit-unit (negara-negara) yang ada didalamnya memiliki ketergantungan satu sama lain. Sistem itu beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan dan kompetisi antara produsen dan konsumen”[[42]](#footnote-43).**

Aspek ekonomi menjadi penting karena menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan manusia, maka negara-negara lebih melihat kerjasama ekonomi sebagai sesuatu yang menguntungkan. Karenanya tidak heran jika bermunculan kerjasama ekonomi regional yang dijadikan sebagai wadah bagi negara-negara untuk ‘menggairahkan’ perekonomian domestik mereka[[43]](#footnote-44).

**Robert Gilpin** (1987) mendefinisikan liberalisme, yaitu **“sebagai sebuah doktrin atau seperangkat prinsip untuk mengatur dan ­*me-manage* suatu ekonomi pasar sehingga tercapai efesiensi maksimum, pertumbuhan ekonom, dan kesejahteraan individu”**. Semua bentuk itu didasarkan atas kepercayaan terhadap pasar dan mekanisme harga sebagai sarana yang paling tepat untuk mengorganisir hubungan ekonomi internasional maupun kegiatan ekonomi domestik. Dalam prinsipnya, sebuah ekonomi internasional diatur oleh hukum permintaan yang intinya, orang akan membeli barang lebih banyak jika harga murah dan lebih sedikit jika harga naik. Selain itu, orang juga akan membeli barang lebih banyak jika pendapatan tinggi dan lebih sedikit jika pendapatan rendah[[44]](#footnote-45).

Selanjutnya dukungan terhadap ekonomi pasar sebagai perdagangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dinyatakan oleh **Khan** yang menyatakan bahwa:

**Perdagangan akan meningkatkan kekayaan dan kekuasaan bagian-bagian populasi yang cinta damai dan produktif dengan mengorbankan aristokrasi yang berorientasi perang, dan akan mengantarkan manusia dari berbagai bangsa yang berbeda ke dalan sebuah hubungan yang akan menjadikan mereka semua jelas tentang apa kepentingan fundamental mereka.**

 Perdagangan bebas juga akan menghancurkan pemisah antara negara dan individu yang bersatu dalam sebuah komunitas. Pasar bebas akan memperluas lingkup kontak dan level komunikasi antara masyarakat dunia, mendukung persahabatan dan pemahaman internasional[[45]](#footnote-46).

 **Adam Smith** dan **Tom Paine** juga mengemukakan, bahwa **“jika perdagangan dibiarkan kebatas universal yang mampu dicapainya, ia akan memberantas sistem perang dan menghasilkan sebuah revolusi dalam negara berpemerintahan biadab”[[46]](#footnote-47)**.

 Para penganut aliran liberal percaya bahwa ekonomi dan perdagangan merupakan sumber perdamaian hubungan antar bangsa. Keuntungan timbal balik dari perdagangan dan interdependensi yang berkembang diantara bangsa-bangsa cenderung akan memperkuat hubungan yang kooperatif. Mereka memandang dinamika dalam ekonomi internasional sebagai sesuatu yang dominan dalam membentuk pola-pola hubungan internasional dalam perubahan kebijakan-kebijakan negara-negara tertentu. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah negara manapun senantiasa harus memperhitungkan kekuatan-kekuatan pasar. Setiap usaha untuk mengningkari kekuatan pasar hanya akan menyebabkan kerapuhan kekuatan politik (pemerintah) itu sendiri[[47]](#footnote-48).

Secara sederhana definisi ekonomi pasar juga didefinisikan oleh **Robert Gilpin** yang menyatakan bahwa:

**Ekonomi pasar sebagai sesuatu dimana barang-barang dan jasa-jasa dipertukarkan atas dasar harga-harga relatif; dimana transaksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut berlangsung melintasi batas-batas negara dan mereka yang terlibat dalam transaksi (penjual dan pembeli) bisa berupa swasta maupun negara[[48]](#footnote-49).**

 Dari definisi diatas menjelaskan bahwa ekonomi pasar adalah adanya kebebasan barang, produk, dan jasa yang diserahkan kepada transaksi pasar. Kebijakan pasar diyakini sebagai jalan bagi negara-negara untuk menjaga perdamaian. hal tersebut senada dinyatakan oleh **Cobden** bahwa “**Pasar bebas adalah abadi dalam kebenarannya dan universal dalam aplikasinya. Pasar bebas merupakan kunci menuju keharmonisan dan perdamaian global; keberhasilan pasar bebas adalah sebuah kemenangan prinsip-prinsip ketentraman antara semua bangsa di dunia”[[49]](#footnote-50).**

 Sebuah karakter pokok dari ekonomi pasar adalah ketergantungannya pada tingkat keterbukaan *(openness)* dan intensitas kompetisi antara para penjual dan pembeli. Artinya, sebuah ekonomi pasar dapat dikatakan sempurna jika sistem itu terbuka bagi semua penjual dan pembeli potensial, dimana tidak ada penjual maupun pembeli yang dapat menentukan *term id exchange.* Prinsip keterbukaan dan kompetensi menuntut adanya suatu mekanisme dimana proses produksi, distribusi, dan penetapan harga-harga tidak dapat dikontrol oleh pihak-pihak tertentu[[50]](#footnote-51). Meskipun liberalisme sadar bahwa kemajuan ekonomi tidak seragam (baik pada ekonomi domestik ataupun ekonomi internasional), mereka percaya bahwa dalam jangka panjang, operasi kekuatan pasar mengarah pada persamaan tingkat ekonomi, upah riil, dan harga-harga diantara negara-negara dan kawasan. Mereka menemukan kendala mendasar terhadap pembangunan ekonomi negara kurang berkembang yang muncul dari negara-negara itu sendiri. Besarnya kehidupan pertanian, kurangnya pendidikan teknik, keinginan menabung yang rendah, sistem finansial yang lemah, dan yang terpenting kebijakan pemerintah yang tidak efisien. Apabila hambatan tersebut dihilangkan, dan pasar dapat mulai berfungsi secara efisien, maka ekonomi akan dapat lepas dari keterbelakangan[[51]](#footnote-52).

 **Hirschman** dalam bukunya *Essay in Trepassing: Economic to Politics and Beyond* (1981), menyebutkan bahwa:

**Masyarakat tidak lagi memandang masalah kemiskinan sebagai persoalan alamiah atau kutukan tuhan atau karena nasib ataupun karena karma seseorang. Orang-orang pada umumnya percaya bahwa kemiskinan dengan konsekuensinya itu dibuat oleh manusia, sehingga kondisi-kondisi demikian menjadi tidak dapat diterima lagi pada masa kini. Kemajuan dan pengaruh yang dicontohkan dari negara-negara berkembang serta telah jauhnya kemajuan negara-negara lain, telah meningkatnya kesadaran bahwa kemiskinan adlah suatu nasib yang tidak dapat diterima[[52]](#footnote-53).**

 *ASEAN Economic Community* sebagai jalan perdagangan bebas di kawasan Asia Tanggara telah berupaya menghapus atau mengurangi hambatan bagi arus lalu lintas barang. Akan tetapi upaya serta persiapan dalam meraih kesempatannya dikembalikan pada negara anggota masing-masing. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh **Arthur Lewis** bahwa **“ekonomi manapun dapat berkembang apabila memiliki tiga rumusan sederhana: curah hujan yang mencukupi, sistem pendidikan sekunder, dan pemerintah yang berpikiran sehat[[53]](#footnote-54)**.

 Dalam hal ini, negara bukan sebagai penghambat bagi perdagangan bebas, tetapi berfungsi untuk memfasilitasi dan menjamin ketertiban pelaksanaan perdagangan bebas dengan memperbaiki birokrasi, meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dan perbaikan infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasionalnya. Seperti yang dikatakan **Adam Smith** dalam *The Wealth of Nations* menyatakan bahwa:

**Mengapa masyarakat tertentu dapat mengatasi halangan pembangunan, mentransformasikan diri mereka menjadi kaya melalui adapatasi terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Jawabannya adalah, bahwa masyarakat yang berhasil ini telah membiarkan pasar untuk berkembang tanpa adanya campur tangan politik[[54]](#footnote-55).**

 Apa yang dikatakan Smith merupakan perserabutan dari intervensi pemerintah secara langsung kedalam mekanisme pasar. Kegagalan untuk kemajuan bagi negara-negara sedang membangun, adalah karena ketidaksempurnaan pasar domestik, ekonomi yang tidak efesien dan kekakuan sosial. Hal lain yang menjadi persoalan utama negara berkembang adalah proses pembentukan atau akumulasi modal yang cepat sebagai dasar vital bagi pembangunan[[55]](#footnote-56).

 Para ahli ekonomi mengungkapkan betapa pentingnya perdagangan internasional dalam pembangunan bagi suatu negara, sampai-sampai dianggap sebagai mesin pertumbuhan. Perdagangan internasional memperluas pasaran dan merangsang investasi, pemdapatan dan tabungan melalui alokasi sumber daya dengan lebih efesien[[56]](#footnote-57). Kebijaksanaan perdagangan dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan yang dapat menopang pencepatan laju pembangunan ekonomi dengan:

1. **Memungkinkan negara berkembang memperoleh bagian lebih besar dari manfaat perdagangan;**
2. **Meningkatkan laju pembentukam modal;**
3. **Meningkatkan industrialisasi; dan**
4. **Menjaga keseimbangan neraca pembayaran[[57]](#footnote-58).**

 Mengenai pertumbuhan ekonomi suatu negara **Walt Whitman Rostow**, dalam bukunya *The Stages of Economic Growth: A Non Comunist Manifesto* (1960/1962). Menurut pandangannya pertumbuhan ekonomi di dunia adalah suatu kelanjutan dari industrialisasi yang dicanangkan negara-negara kaya dan industri maju. Namun demikian, bagi negara-negara kurang berkembang proses pertumbuhannya tidak dapat dilakukan secara dramatis sebagaimana terjadi di negara-negara maju yang memang sudah mempunyai basis kekuatan ekonomi dan industri mereka. Dalam hal negara-negara kurang berkembang proses identifikasi posisi pertumbuhan tiap-tiap masyarakat adalah melalui tahapan-tahapan tertentu seiring dengan pendekatan sejarahnya yakni[[58]](#footnote-59):

1. **Masyarakat tradisional *(the traditional stage)***
2. **Masyarakat pra kondisi untuk periode lepas landas *(the pre-condition for take off)***
3. **Periode lepas landas *(take off)***
4. **Gerak menuju kedewasaan *(the drive to maturity)***
5. **Tingkat konsumsi tinggi *(the age of high-mass consumption)*[[59]](#footnote-60)*.***

 Tahapan-tahapan pertumbuhan tersebut merupakan evolusi dari pertumbuhan ekonomi suatu negara, setiap perkembangan ekonomi tersebut menjadi perhatian dan bergantung pada pengelolaan oleh pemerintah terutama bagi para pelaku usaha yang terlibat didalamnya.

 Bagi pelaku usaha yang terlibat langsung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, **Joseph Alois Schumpeter** dalam buku *Theory of Economic Development,* menyatakan **“Faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proese inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau *entrepreneur* (wiraswasta). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para *entrepreneur”[[60]](#footnote-61).***

 **Schumpeter** menekankan pentingnya peranan pengusaha didalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi, diantaranya:

1. **Memperkenalkan barang-barang baru.**
2. **Mempertinggi efesien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang.**
3. **Memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran baru.**
4. **Mengembangkan sumber bahan mentah yang baru.**
5. **Mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefesien kegiatan perusahaan.**

 Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru. Didalam mengemukakan teori pertumbuhannya **Schumpeter** memulai analisanya dengan memisalkan bahwa **“Perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang, tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada waktu keadaan tersebut berlaku, segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan”**.

 Didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari mengadakan pembaharuan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penaman modal. Investasi yang baru ini akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat menjadi bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru. **Schumpeter** menyatakan bahwa “**Semakin tinggi tingkat kemajuan sesuatu sistem ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan tercapai tingkat ‘keadaan tudak berkembang’ atau *stationary state”[[61]](#footnote-62)****.*

 Semangat jiwa usaha atau *entrepreneur* sudah seharusnya menjadi naluri bagi para pengusaha di dalam suatu negara, karena manfaat serta pelaku didalam *ASEAN Economic Community* ditentukan juga oleh para pelaku usahanya. Semakin maju perusahaan di dalam suatu negara dan menggerakan berbagai sektor , maja pertumbuhan ekonomi akan meningkat bergitu juga dengan pendapatan pemerintah.

 Mengenai hal ini **Sir Roy F. Harrod dan Evsey Domar (Harrod-Domar)** mencoba untuk menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekenomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan mantap *(steady growth)*. **Harrod-Domar** memberikan kunci kepada investasi didalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi yaitu investasi menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekenomian dengan cara meningkatkan stok modal. Karena itu, selama netto tetap berlangsung, pendapatan nyata dan *output* akan senantiasa membesar. Namun demikian, untuk mempertahankan tingkat ekuilibrium pendapatan pada pekerjaan penuh dari tahun ke tahun, baik pendapatan nyata maupun *output* tersebut keduanya harus meningkat daalam laju yang sama pada saat kapasitas produktif Moda meningkat. Kalau tidak, setiap perbedaan antara keduanya akan menimbulkan kelebihan kapasitas atau kapasitas menganggur. Hal ini memaksa para pengusaha membatasi pengeluaran investasinya sehingga akhirnya akan berpengaruh buruk pada perekonomian yaitu menurunkan pendapatan dan pekerjaan pada periode berikutnya dan menggeser perekonomian keluar jalur ekuilibrium pertumbuhan mantap. Jadi apabila pekerjaan hendak dipertahankan dalam jangka panjang, maka investasi harus senantiasa diperbesar. Ini lebih lanjut memerlukan pertumbuhan pendapatan nyata secara terus-menerus pada tingkat yang cukup untuk menjamin penggunaan kapasitas secara penuh atas stok modal yang sedang tumbuh. Tingkat pertumbuhan pendapatan yang diperlukan ini dapat disebut sebagai tingkat pertumbuhan atau tingkat pertumbuhan penuh[[62]](#footnote-63). **Teori Harrod-Domar** ini mempunyai beberapa asumsi yaitu:

1. **Perekonomian dalam keadaan pengejaran penuh *(full employment)* dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.**
2. **Terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.**
3. **Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.**
4. **Kecenderungan untuk menabung *(marginal propensity to save =* MPS*)* besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-*output* *(capital-output ratio =* COR) dan rasio pertambahan modal-*output (i ncremental capital – output ratio =* ICOR).**

Dalam teori **Harrod-Domar** ini, fungsi produksi berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat *output* tertentu (modal dan tenaga kerja tidak substitutif). Untuk menghasilkan *output* sebesar Q, diperlukan modal Ki dan tenaga kerja L. dan apabila kombinasi itu berubah maka tingkat *output* berubah. Untuk *output* sebesar Q2, misalnya hanya dapat diciptakan jika stok modal sebesar K2[[63]](#footnote-64).

(GAMBAR)

Menurut **Harrod-Domar** setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan *output* total (Y), misalnya jika 3 rupiah modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikan) *output* total sebesar 1 rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan *output* total sesuai denagn rasio modal – *output ­*tersebut[[64]](#footnote-65).

Tumbuhnya suatu perekonomian ditentukan oleh tingkat tabungan dan investasi. Semakin banyak tabungan dan kemudian diinvestasikan, maka semakin meningkat perekonomian tersebut. Tetapi, dalam pertumbuhan ekonomi faktor terpenting tergantung pada produktivitas dari investasi itu sendiri. **Komarudin** (1983) memberikan pengertian investasi dalam tiga arti, yaitu:

1. **Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi, atau surat pe-nyertaan lainnya;**
2. **Suatu tindakan membeli barang-barang modal;**
3. **Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan dimasa yang akan datang[[65]](#footnote-66).**

Dari definisi diatas dijelaskan bahwa investasi merupakan pembelian saham atau surat berharga pemerintah lainnya, pembelian modal seperti tanah, perusahaan, dan yang diharapkan dengan adanya investasi dapat memberikan keuntungan bagi para investor.

 Kemudian **Sunariyah** memberikan pengertian investasi, yaitu **“investasi ialah penanaman modal untuk satu ataupun lebih aktiva yang dimiliki dan juga biasanya berjangka waktu lama dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dimasa-masa yang akan datang”[[66]](#footnote-67)**.

Masuknya investasi asing ke suatu negara, bisanya diharapkan bisa memberi keuntungan dan manfaat timbal balik. Ada segi keuntungan *(profit)* bagi investor dan ada segi manfaat *(benefit)* bagi rakyat di negara penerima (tuan rumah). Bagi rakyat dan negara tuan rumah, keberadaan investasi asing diharapkan bisa turut mendukung pembangunan, antara lain dengan menyediakan tambahan modal untuk menggerakan roda produksi dan peningkatan taraf hidup[[67]](#footnote-68).

Modal asing dapat memasuki suatu negara dalam bentuk modal swasta dan modal negara. Modal asing swasta dapat mengambil bentuk, diantaranya:

1. **Investasi Langsung**

**Berarti bahwa perusahaan dari negara penanam modal secara *de facto* dan *de jure* melakukan pengawasan atas *asset* yang ditanam di negara pengimpor modal dengan cara investasi itu.**

**Investasi langsung dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu:**

1. **Pembentukan suatu cabang perusahaan di negara pengimpor modal;**
2. **Pembentukan suatu perusahaan dalam mana perusahaan dari negara penanam modal memiliki mayoritas saham;**
3. **Pembentukan suatu perusahaan di negara pengimpor yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan yang terletak di negara penanam modal;**
4. **Mendirikan suatu korporasi di negara penanam modal untuk secara khusus beroperasi di negara lain; atau**
5. **Menaruh *asset* tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari negara penanam modal.**
6. **Investasi Tidak Langsung**

**Lebih dikenal sebagai investasi *portfolio* atau *rentier* sebagian besar terdiri dari penguasaan atas saham yang dapat dipindahkan (yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah negara pengimpor modal), atas saham atau surat utang oleh warga negara dari beberapa negara lain. Penguasaan saham tersebut tidaklah sama dengan hak untuk mengendalikan perusahaan. Para pemegang saham hanya mempunyai hak atas *deviden* saja. Pada saat ini telah berkembang investasi tidak langsung secara multilateral. Warga negara dari suatu negara membeli surat-surat obligasi *International Bank for Recontruction and Development* (IBRD) yang diambangkan atau yang membiayai suatu proyek khusus di beberapa negara terbelakang[[68]](#footnote-69).**

Dalam garis besarnya, terdapat tiga sumber utama modal asing dalam suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, yaitu pinjaman luar negeri *(debt),* penanaman modal asing *(Foreign Direct Investment=* FDI*)* dan investasi portofolio (Pangestu, 1995). Pinjaman luar negeri dilakukan oleh pemerintah secara bilateral maupun multilateral, FDI merupakan investasi yang dilakukan swasta asing ke suatu negara. Bentuknya dapat berupa cabang perusahaan multinasional, anak perusahaan multinasional, lisensi, *Joint Ventura,* sedangkan investasi portofolio merupakan investasi yang dilakukan melalui pasar modal[[69]](#footnote-70).

Salah satu wilayah yang paling peka dalam perbincangan menganai ekonomi politik internasional dewasa ini adalah investasi langsung. Akuntan-akuntan neraca pembayaran menjabarkan investasi luar negeri langsung yaitu sebagai suatu atus pemberian pinjama kepada, atau pembelian kepemilikan, perusahaan luar negeri yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh penduduk dari negara yang melakukan investasi. Bagi Amerika Serikat, 10 persen pemilikan oleh perusahaan yang menginvestasikan modalnya sudah mencakup pengertian definisi langsung yang ditetapkan resmi oleh pemerintah[[70]](#footnote-71).

Mengenai faktor yang dapat mempengaruhi penanaman modal **asing Alan M. Rugman** (1981) menyatakan bahwa:

**Penanaman modal asing dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Variabel lingkungan seringkali disebut keunggulan spesifik negara atau faktor spesifik. Sedangkan variabel internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan merupakan keunggulan internal yang dimililki perusahaan multinasional[[71]](#footnote-72).**

Penanaman modal asing atau investasi selain dilihat dari potensi perusahaan dalam mengembangkan perusahaannya juga ditinjau dari situasi dan kondisi potensi negara yang hendak dijadikan tempat untuk berinvestasi seperti kekayaan sumber daya alam, tenaga kerja, pendapatan perkapita, dll.

Menurut **Zaenudin** (2009) dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa:

**Bebarapa studi menemukan beberapa hal yang menjadi permasahalan investasi. Laporan Bank Dunia mengenai iklim investasi *(World Bank, 2005)* mengatakan terdapat empat faktor terpenting dalam menarik investasi, antara lain stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan ekonomi[[72]](#footnote-73).**

Investasi merupakan konsep aliran *(flow concept),* karena besarnya dihitung selama satu interval periode tertentu. Tambahan stok barang modal adalah sebesar pengeluaran investasi satu periode sebelumnya[[73]](#footnote-74). Yang paling menentukan tingkat biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman, semakin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi semakin mahal. Akibatnya minat berinvestasi makin menurun. Namun tidak jarang walaupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat akan investasi tetap rendah. Hal ini disebabkan biaya total investasi masih tinggi. Faktor yang mempengaruhi terutama adalah masalah kelembagaan. Misalnya, prosedur izin investasi yang berbelit-belit dan lama (> 3 tahun), menyebabkan biaya ekonomi dengan memperhitungkan nilai waktu uang dari investasi makin mahal. Demikian halnya dengan keberadaan dan efesiensi lembaga keuangan, tingkat kepastian hukum, stabilitas politik, dan keadaan keamanan[[74]](#footnote-75).

Senada dengan **Tambunan** (2006) menyatakan bahwa:

**Terdapat sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik-tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi serta adanya kepastian dari kebijakan pemerintah[[75]](#footnote-76).**

Selain suprastruktur politik yang sangat menentukan terhadap iklim investasi, pemerintah juga harus membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar ekonomi sebagai pendukung untuk menjamin kelancaran dalam ekonomi yang efektif dalam persaingan ekonomi global.

Suatu kebijakan mengejar ketinggalan dietmpuh oleh negara-negara yang lazim dikenal dengan sebutan *New Industrializing Countries* (NICs) dengan cara mendorong negara untuk berperan secara aktif dalam menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif. Menurut **Frederic C. Deyo** (1987: 16-17), negara melakukan *strategic intervention* (intervensi strategis) dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian NICs. Intervensi ini meliputi beberapa hal, diantaranya:

1. **Negara menghilangkan hambatan-hambatan sistemik (birokrasi berlebihan, peraturan perpajakan yang rumit, infrastruktur yang kurang memadai, dll.) serta memberikan pelbagai kemudahan bagi sektor industri (insentif pajak, peraturan ekspor-impor yang lebih sederhana, pembenaan fasilitas infrastruktur) untuk mencegah distorsi dan sekaligus memacu proses industrialisasi di dalam negeri.**
2. **Negara bertanggung jawab untuk menjaga koherensi dan konsistensi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pelbagai departemen penting (terutama kementerian perdagangan dan industri, kementerian keuangan, dan kementerian urusan perburuhan) agar terfokus pada upaya peningkatan produktivitas dan upaya penertasi pasar terutama di luar negeri.**
3. **Negara bertanggung jawab untuk menjaga agar strategi industrialisasi yang dipilih dapat secara efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini negara bertanggung jawab untuk memelihara komitmen setiap pelaku bisnis dan lembaga pemerintah agar secara bersama-sama memacu perkembangan sektor industri di dalam negeri. Jadi negara berperan aktif dalam memonitor hubungan kausal antara strategi dengan *performance* (prestasi)[[76]](#footnote-77).**

Disinilah fungsi negara untuk memfasilitasi dan meyakinkan para pelaku ekonomi dan menjnamin menstabilkan keberlangsungan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ketika komunitas investasi asing telah terbebas dari rintangan, dan mampu memilih lokasi paling menguntungkan bagi modalnya, komunitas tersebut akan berpengaruh terhadap proses penyeragaman perkembangan ekonomi negara-bangsa melewati dunia. Dengan apa yang secara efektif merupakan sebuah perang penawaran untuk memperoleh masukan modal yang sangat dibutuhkan, negara-negara digerakan oleh efek standar umum yang paling rendah untuk mengurangi regulasi, standar, upah dan persyaratan, agar nampak menarik bagi investor, dengan bahasa kontemporer, inilah apa yang dimaksudkan dengan ‘daya saing internasional’. Prioritas diberikan pada hasrat efesiensi dan profit. Dalam beberapa kasus ini, langkah ini merupakan satu-satunya cara negara dapat merebut dan memelihara kepercayaan global.

**Scot Burcell** dalam diplomasi ekonomi, terdapat empat pilar kegiatan ekonomi, yaitu:

1. **Promosi perdagangan, dengan fokus utama tapi tidak eksklusif pada penanganan kegiatan untuk meningkatkan ekspor.**
2. **Promosi peluang investasi, terutama memfokuskan pada investasi ke dalam negeri, tetapi tidak dikhususkan pada investasi dari negara-negara lain.**
3. **Menarik masuknya tekhnologi yang memadai, termasuk teknologi panen.**
4. **Pengelolaan bantuan ekonomi, yang perlu untuk negara-negara berkembang pada umumnya sebagai penerima dan sebagai donor dalam kasus negara maju[[77]](#footnote-78).**

Setiap negara dipastikan membutuhkan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasionalnya , begitu juga dengan penarikan investasi harus disertai dengan rencana strategis yang meyakinkan terhadap potensi ekonomi nasionalnya yang kondusif dan proinvestasi.

Secara garis besar, penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi negara berkembang dapat diperinci menjadi lima, yaitu:

1. **Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat dan pertumbuhan ekonomi.**
2. **Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpi ndahan struktur produksi dan perdagangan.**
3. **Modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural.**
4. **Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing dimasa selanjutnya lebih produktif.**
5. **Bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis, adanya modal asing akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabrik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya[[78]](#footnote-79).**

Dengan adanya investasi disatu sisi yang diyakini sebagai alat yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, disisi lain juga diharapkan mampu membangun perekonomian dari tradisional menuju modernisasi ekonomi. Dengan demikain pendapatan atau penghasilan dari pengelolaan investasi untuk negara berkembang seperti Indonesia senantiasa berpengaruh untuk menjawab masalah dari ekonomi nasionalnya melalui kekuatan investasi dari pada melalui pinjaman atau bantuan luar negeri.

Seperti yang dikatakan menurut **Muhammad Aulia Zul Thirafi** (2012) dalam jurnalnya menyatakan bahwa **“penanaman modal asing atau investasi asing dianggap lebih menguntungkan karena tidak memerlukan kewajiban pengembalian kepada pihak asing seperti halnya hutang luar negeri”[[79]](#footnote-80).**

Kerugian dan keuntungan sudah menjadi suatu bagian dari investasi yang sudah menjadi konsekuensi bagi para investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara, berbeda dengan bantuan atau pinjaman luar negeri yang syarat akan pengembalian dan memaksa suatu negara untuk melunasi semua bantuannya.

Kekuatan investasi yang dipercaya sebagai tambahan modal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi haruslah menempati perhatian yang serius dalam pasar global yang menciptakan persaingan kompetitif. Hal ini senada dengan **Michael Porter** yang membagi tahapan industrialisasi menjadi tiga, yaitu:

1. **Tahap *factor driven* yaitu faktor yang digerakkan oleh ketersediaan faktor produksi.**
2. **Tahap *invesment driven* yaitu faktor yang didorong oleh kekuatan investasi.**
3. **Tahap *innovation driven* yaitu faktor yang dimotori oleh kemampuan inovasi.**

Pada awalnya, industrialisasi lebih mengandalkan pada upah buruh rendah dan ketersediaan sumber daya yang berlimpah. Setelah itu laju industrialisasi lebih ditentukan oleh faktor investasi. Sebagian besar negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand sedang dalam tahap transisi dari *factor driven* menuju *investment driven.* Sejumlah negara berkembang lain seperti Korea Selatan dan Taiwan telah termasuk ke tahap *innovation driven [[80]](#footnote-81).*

Itu sebabnya, persaingan antarnegara berkembang yang paling menonjol saat ini adalah persaingan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar para investor dapat bergerak leluasa di negara-negara tersebut. Berbagai cara dilakukan, dari deregulasi sampai pemberian intensif besar-besaran. Tidak ada negara yang mau ketinggalan dalam perlombaan memberi kemudahan dan kenyamanan untuk investasi ini. Negara yang peraturannya berbelit-belit, birokrasinya ruwet, korupsinya meluas, kualitas sumber daya manusianya rendah, dan infrastruktur bisnisnya parah, tidak akan banyak menarik investor. Sehingga yang akan terjadi adalah lingkaran setan *(vicious circle)* ekonomi biaya tinggi. Hal demikian membuat para investor akan memilih negara lain sebagai basis produksinya[[81]](#footnote-82).

1. **Hipotesis**

Berdasarkan dari permasalahan dan penjelasan kerangka teoritis diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis, sebgai berikut:

**Jika *ASEAN Economic Community* dapat mengatur regulasi investasi untuk meningkatkan kemampuan daya saing dalam menarik investasi diantara negara-negara anggota ASEAN, maka iklim investasi di Indonesia akan meningkat, ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional melalui upaya kebijakan pemerintah untuk membangun pelayanan birokrasi dan infrastruktur ekonomi.**

1. **Operasional Variabel dan Indikator**

Sebagaimana telah disebutkan dalam judul penelitian dan juga dalam hipotesis maka untu lebih lanjut akan dikemukakan tabel operasional variabel dan indikator

Tabel 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Variabel Bebas:Pengaruh ASEAN Economic Community | 1. KTT ASEAN ke-13 tanggal 20 November 2007 di Singapura.
2. KTT ASEAN ke-14 tanggal 27 Februari 2009 di Chaam, Thailand.
3. Dibentuknya ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang merupakan pengganti ASEAN Investment Area (AIA) dan Investment Guarantee Agreement (IGA).
 | 1. AEC Blueprint yang memuat empat karakteristik sebagai pedoman bagi negara-negara ASEAN.

Sumber data: www.kemlu.go.id1. Disepakatinya ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) sebagai kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam liberalisasi dan fasilitas perdagangan barang.

Sumber data: www.kemendag.go.id1. ACIA ditandatangani pada 26 Februari 2009 di Chaam, Thailand. ACIA merupakan persetujuan bidang investasi yang lebih komprehensif dan *forward looking* dengan 4 pilar sebagaimana tertuang dalam ASEAN Blueprint.

Sumber data:www.kemendag.go.id |
| Variabel Terikat:Terhadap kondisi iklim investasi di Indonesia | 1. Dibentuknya INSW (*Indonesian Nation Single Window)*
2. Laporan United Nations Confrence Trade and Development yang dirangkum dalam *World Investment Report 2015.*
3. Indonesia msaih jadi negara tujuan investasi
 | 1. Peranan INSW sebagai bagian dari ASEAN Single Window yang menjaga kepentingan nasional dalam menghadapi Asean Economic Community.

Sumber data:www.insw.go.id1. (UNCTAD) menyatakan PMA Indonesia naik 20% dan tertinggi di ASEAN.

Sumber data:www.cnnindonesia.com1. Indonesia memiliki prospek yang baik dilihat dari pasar domestik 40% dari total populasi ASEAN, bonus demografi dan sumber daya alam yang melimpah.

Sumber data:www.kemenperin.go.id |

1. **Skema Kerangka Teoritik**

***ASEAN ECONOMIC COMMUNITY***

**ARUS BEBAS INVESTASI**

**STRATEGI, REGULASI, DAN FASILITAS**

**LIBERALISASI, PELAYANAN, PROMOSI, DAN PENGAMANAN**

**KONDISI IKLIM INVESTASI DI INDONESIA**

**REFORMASI BIROKRASI, INSW, DNI 2014**

**NEGARA INDONESIA**

***ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT* (ACIA)**

**BUDAYA INVESTASI DI INDONESIA**

**ATIGA SEBAGAI KODIFIKASI KESEPAKATAN ASEAN**

1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Penggunaan Tingkat Analisis disini adalah:

Analisa reduksionis, yang unit analisanya pada tingkatan yang lebih rendah. Dimana *ASEAN Economic Community* merupakan tingkat analisa individu dan kelompok sebagai unit eksplanasi dan Indonesia merupakan tingkat analisa negara-bangsa sebagai unit analisa.

1. **Meotode penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

* 1. *Metode Deskriptif*, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada denga tujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta *(Fact Finding),* yang kemudian diajukan dengan menganalisa data atau fenomena tersebut untuk mencari solusi dalam kaitan-kaitannya dengan strategi baru. Dengan metode deskriptif ini, peneliti ingin mencari tahu sejauh mana perkembangan investasi yang ada di Indonesia sebagai rencana atau pengambilan keputusan dalam menghadapi *ASEAN Economic Community*, terlebih mengenai kondisi iklim investasi di Indonesia tersebut.
	2. *Metode Historis*, yaitu metode penelitian yang bermaksud membuat rekontruksi masa lalu secara sistematis dan obejektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat. Untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan penyebab, pengaruh atau perkembangan kejadian yang dapat membantu dengan memberikan informasi pada kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Dengan metode historis ini, peneliti ingin mencari fakta mengenai kesiapan dari awal perkembangan mengenai *ASEAN Economic Community* dan mencari sebab dari peningkatan kondisi iklim investasi di Indonesia.
		1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* (Studi Kepustakaan). Bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini dan meneliti langsung ke lapangan. Penelaahan data tersebut didapati juga dari buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun dari *website/* internet yang membahas *ASEAN Economic Community* dan pengaruhnya terhadap kondisi iklim investasi di Indonesia.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi lembaga-lembaga yang peneliti tuju untuk penelitian ini adalah:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan. Jl. Lengkong Besar No.68, Bandung.
2. Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah

  Jl. Soekarno-Hatta No.629, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40285

Telepon:(022) 7310435

1. **Lamanya Penelitian**

Penelitian dilakukan kurang lebih 6 bulan, terhitung dari bulan Oktober 2015, yang merupakan tahap awal dari pengumpulan data, dan selesai bulan April 2016.

**Tabel 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Kegiatan** | **Waktu Pelaksanaan Penelitian** |
| **Oktober** | **November** | **Desember** | **Januari** | **Februari** | **Maret** | **April** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Tahap Persiapan** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a. Konsultasi judul |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b. Pengajuan Judul |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c. Pengajuan dan revisi proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| d. Seminar proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| e. Perbaikan hasil seminar proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2** | **Tahap Penelitian** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a. Pengurusan surat izin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b. Kepustakaan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3** | **Pengolahan data** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4** | **Analisis data** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **5** | **Kegiatan akhir** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a. Penyusunan draft |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b. Seminar draft |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| c. Perbaikan hasil seminar draft |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| d. Persiapan dan sidang skripsi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Jadwal Penelitian**

1. **Sistematika Penulisan**

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

**BAB I** Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Lamanya Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II** Berisi uraian mengenai variabel bebas yaitu *ASEAN Economic Community* sebagai suatu kerjasama ekonomi ASEAN yang mempengaruhi kondisi iklim investasi di Indonesia.

**BAB III** Berisi uraian tentang variabel terikat yaitu mengenai permasalahan kondisi iklim investasi di Indonesia.

**BAB IV** Berisi analisis pembahasan masalah dan memaparkan hasil penelitian yang diteliti.

**BAB V** Penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian.

1. Sekretariat Nasoinal ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Asean Selayang Pandang* (Jakarta: Sekretariat Nasoinal ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 1987), hlm. 29. [↑](#footnote-ref-2)
2. Wahyuningsih, “Peran Pemuda Indonesia Dalam Menghadapi *ASEAN Economic Community* (AEC) Atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”, *Lingkar Studi Pendidikan Universitas Sebeleas* *Maret*, 8 Desember 2014. Dalam http://Isp.fkip.uns.ac.id/peran-pemuda-indonesia-dalam-menghadapi-asean-economic-community-aec-atau-masyarakat-ekonomi-asean-mea-wahyuningsih-2014/, diakses pada 25 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-3)
3. Wikipedia, “Wawasan ASEAN 2020”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/wawasan\_2020\_ASEAN, diakses pada 25 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-4)
4. “Laporan Dampak *ASEAN Economic Community* Terhadap Sektor Indistri Dan Jasa, Serta Tenaga Kerja Di Indonesia”, *Kementerian Keuangan Republik Indonesia,* 3 Juli 2015, dalam http://www.kemekeu.go.id/kajian/laporan-dampak-asean-economic-community-terhadap-sektor-industri-dan-jasa-serta-tenaga-kerja, diakses pada 25 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ridho Jusmadi, “Kebijakan Perdagangan Bebas Serta Pengaturan Merger & Akuisisi Lintas Negara Dalam Sistem Hukum Persaingan Usaha”, tesis Magister Hukum tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2011, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-6)
6. Sekretariat Nasoinal ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Op. Cit.,*hlm. 37.. [↑](#footnote-ref-7)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang penanaman modal, dalam http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/25TAHUN2007UU.htm, diakses pada 14 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-8)
8. ##  Renintha Karina, “Bidang Usaha Tertutup (Daftar Negatif Investasi)”, *Hukum Penanaman Modal.com*, dalamhttp://hukumpenanamanmodal.com/bidang-usaha-tertutup-daftarnegatif-investasi/(Online), diakses pada 14 Februari 2016.

 [↑](#footnote-ref-9)
9. Deby Selina Panjaitan, “Pemerintah Menerbitkan Daftar Negatif Investasi Terbaru”, *Hukum Penanaman Modal.com*, dalam http://hukumpenanamanmodal.com/pemerintah-menerbitkan-daftar-negatif-investasi-terbaru/#more-112*,* diakses pada 14 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ini Dia Revisi Daftar Negatif Investasi Beberapa bidang usaha yang dibatasi untuk kepemilikan asing serta pembatasan pemilikan asing yang sebelumnya dibuka dalam DNI, menjadi tertutup, *Hukum Online.com,* Selasa, 24 Desember 2013dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b97a8279176/ini-dia-revisi-daftar-negatif-investasi, diakses pada 14 Februari 2016.

 [↑](#footnote-ref-11)
11. Muhamad Agil Aliansyah dan Nuryadi Abdurohman, “Kerja Keras Puluhan Tahun Soeharto Hancur Dihantam Krisis Moneter”, *Merdeka.com* (Online), 29 Agustus 2015, dalam http://www.merdeka.com/peristiwa/kerja-keras-puluhan-tahun-soeharto-hancur-dihantam-krisis-moneter.html, diakses pada 26 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-12)
12. Galih Gumelar, “Naik 20%, Investasi Asing Di Indonesia Tertinggi Di ASEAN”, *CNN Indonesia* (Online), 25 Juni 2015, dalam http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150625010145/naik-20-investasi-asing-di-indonesia-tertinggi-di-asean/, diakses 24 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-13)
13. “ Tentang NSWI (National Single Windows For Ivestment)”, National Single Window For Investement, dalam http://nswi.bkpm.go.id/wps/portal/tentangnswi/!ut/p/c4/04\_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hDAwNPJydDRwMLXx9Ja0-zwBADE5Mwl3Cly\_2CbEdFAJ6Bp0c!/, diakses 26 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-14)
14. “Dr. Lukita D Tuwo: pada 2030, Indonesia Akan Jadi Negara Dengan Ekonomi Terbesar Ke-7”, 17 April 1014, dalam http://bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/dr-lukita-d-tuwo-pada-2030-indonesia-akan-jadi-negara-dengan-ekonomi-terbesar-ke-7/, diakses 24 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Laporan Dampak ASEAN Economic Community Terhadap Sektor Industri Dan Jasa, Serta Tenaga Kerja Di Indonesia*, (Kementrian Keuangan RI: Jakarta, 2014), pdf, hlm. 4-5. [↑](#footnote-ref-16)
16. Scoot Burchill dan Andrew Linklater,Teori-Teori Hubungan Internasional (Terjemahan M. Sobirin) (Bandung: Penerbit Nusa Media), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-17)
17. “Definisi Hubungan Internasional Menurut Para Ahli”, *Dunia Baca.com* (Online), dalam http://duniabaca.com/definisi-hubungan-internasional-menurut-para-ahli.html, diakses pada 04 November 2015. [↑](#footnote-ref-18)
18. Muh Ilmi Ikhsan Sabur, “Pengertian dan Pentingnya Hubungan Internasional”, *X1 SMANSA – Edukasi Tak Boleh Dibatasi* (Online), dalam http://www.smansax1edu.com/2015/02/pwngertian-dan-pentingnya-hubungan.html, diakses pada 04 November 2015. [↑](#footnote-ref-19)
19. Veny Vina Indrianie, *“Peranan International Atomic Energy Agency* (IAIE) Melalui *Programme Of Action For Cancer Therapy* (PACT) Dalam Membantu Negara-negara Berkembang Dalam Memerangi Penyakit Kanker (Studi Kasus: PACT Di Indonesia)”, Skripsi FISIP-HI Unpas tidak diterbitkan 2014, hlm. 31. [↑](#footnote-ref-20)
20. Sitepu, P. Anthonius, *Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.32-33. [↑](#footnote-ref-21)
21. Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Antara Teori & Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 3-4. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
24. Venny Vina Indrianie, *Op. Cit.,* hlm. 43. [↑](#footnote-ref-25)
25. Scoot Burchill dan Andrew Linklater, *Op. Cit.,* hlm. 43. [↑](#footnote-ref-26)
26. Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 50. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid.,* hlm. 52. [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid.,* hlm. 58-59. [↑](#footnote-ref-30)
30. Diplomat01, “Definis HI”, *HI Warp (kumpulan Catatan Kuliah Anak HI),* 28 April 2010, dalam http://diplomat01.blogspot.co.id/2010/04/definisi-hi.html, diakses pada 08 November 2015. [↑](#footnote-ref-31)
31. Nuraeni S., Deasy Silvya, Arifin Sudirman, *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid.,* hlm. 05. [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid.,* hlm. 6-12. [↑](#footnote-ref-34)
34. Tohir Qolby, ”Hubungan Internasional (Karakteristik dan Bentuk Regionalisme)”, dalam http://blogmuhamadtohir.blogspot.co.id/2011/12/hubungan-internasional.html (Online), 19 Desember 2011, diakses pada 09 November 2015. [↑](#footnote-ref-35)
35. Nuraeni S., Deasy Silvya, Arifin Sudirman, *Op. Cit.,* hlm. 127-128. [↑](#footnote-ref-36)
36. Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif hukum dan Globalisasi* (jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 151. [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid.,* hlm. 157-158. [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid.,* hlm. 24. [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid.,* hlm. 49. [↑](#footnote-ref-41)
41. Scoot Burchill dan Andrew Linklater, *Op. Cit.,* hlm. 48-49. [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid.,* hlm. 20. [↑](#footnote-ref-43)
43. Nuraeni S., Deasy Silvya, Arifin Sudirman, *Op. Cit.,* hlm. 23-24. [↑](#footnote-ref-44)
44. Umar Suryadi Bakry, *Ekonomi Politik Internasional* (Jakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Jayabaya, 1997), hlm. 9. [↑](#footnote-ref-45)
45. Scoot Burchill dan Andrew Linklater, *Op. Cit.,* hlm. 47. [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-47)
47. Umar Suryadi Bakry, *Op. Cit.,* hlm. 10. [↑](#footnote-ref-48)
48. *Ibid.,* hlm. 22. [↑](#footnote-ref-49)
49. *Ibid.,* hlm. 48. [↑](#footnote-ref-50)
50. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-51)
51. *Ibid.,* hlm. 81. [↑](#footnote-ref-52)
52. Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional – Konsep & Teori (Jilid 1)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 77-78. [↑](#footnote-ref-53)
53. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-54)
54. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-55)
55. *Ibid.,* hlm. 82. [↑](#footnote-ref-56)
56. Jhingan, M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Terjemahan D. Guritno) (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 447-448. [↑](#footnote-ref-57)
57. *Ibid.,* hlm. 460. [↑](#footnote-ref-58)
58. *Ibid.,* hlm. 91. [↑](#footnote-ref-59)
59. Septriani Ajo, “Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli”, *Chief’s nano-nano,* 10 Juli 2013, dalam http://ceptt094.blogspot.co.id/2013/07/teori-pertumbuhan-ekonomi-menurut-para.html#axzz3t6uKl7uA, diakses pada 01 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-60)
60. Putri Intan P., “Pertumbuhan Ekonomi Menurut Schumpeter”, *Wordpress.com,* 15 Juni 2014, dalam http://putrifanda.wordpress.com/2014/06/15/3-5-pertumbuhan-ekonomi-menurut-schumpeter/, diakses pada 01 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-61)
61. Sadono Sukirno, *MakroEkonomi* (Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 2004), hlm. 434-435. [↑](#footnote-ref-62)
62. Jhingan M.L., *Op. Cit.,* hlm. 229-230. [↑](#footnote-ref-63)
63. Sholehan Suyuti, “Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi”, *Wordpres.com,* 28 Februari 2008, dalam http://mutosagala.wordpress.com/2013/02/28/teori-pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi/, diakses pada 05 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-64)
64. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-65)
65. Fazzar 10, “Penanaman Modal Asing”, *Wordpress.com,* 29 Juni 2013, dalam http://fazzar10.wordpress.com/2013/06/29/penanaman-modal-asing/, diakses 05 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-66)
66. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-67)
67. Teuku May Rudi, *Ekonomi Politik Internasional: Peran Domestik Hingga Ancaman Globalisasi* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2007), html. 160. [↑](#footnote-ref-68)
68. *Ibid.,* hlm. 483. [↑](#footnote-ref-69)
69. Fazzar 10, *Loc. Cit.* [↑](#footnote-ref-70)
70. Peter H. Lindert, *Ekonomi Internasional* (Terjemahan Agustinus Subekti) (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 631-632. [↑](#footnote-ref-71)
71. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-72)
72. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-73)
73. Prathama Rahardja, mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (MikroEkonomi & Makroekonomi)* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 270. [↑](#footnote-ref-74)
74. *Ibid.,* hlm. 279. [↑](#footnote-ref-75)
75. Faris Sulaksono, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi PMA (Penanaman Modal Asing) di Batam”, *Wordpress.com,* 28 Juni 2013, dalam htpp://farissulaksono.wordpress.com/2013/06/28/investasi/, diakses pada 06 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-76)
76. Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisinis Internasional* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), 2002), hlm. 80. [↑](#footnote-ref-77)
77. Sukawarsini Djelantik, *Op. Cit.,* hlm. 230. [↑](#footnote-ref-78)
78. Mutmainnah Thalib,”Penanaman Modal Asing”, *Tumblr.com,* dalam http://ninathalib.tumblr.com/post/52298890226/penanaman-modal-asing, diakses pada 06 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-79)
79. Muhammad Aulia Zul Thirafi, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketersediaan Tenaga Kerja, Infrastruktur, Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Penanaman Modal Asing Di Kabupaten kendal” dalam *Economics Development Analisys Journal,* EDAJ 2 (1) 2013, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-80)
80. Hendrawan Supratikno, “Benarkan Terjadi Deindustrialisasi”, *Uni Sosial Demokrat,* 12 juni 2015, dalam http://unisosdem.org./article\_detail.php?aid=9109&coid=2&caid=19&gid=2, diakses pada 06 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-81)
81. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-82)